

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH
KABUPATEN SINJAI**

**WAHYUNIAR
105730409813**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH
KABUPATEN SINJAI**

**WAHYUNIAR
105730409813**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai

Nama Mahasiswa : Wahyuniar
No. Stambuk : 105730409813
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NBM : 497 794



Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NBM : 107 3428

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl.Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866 972 Fax (0411) 8655588 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama WAHYUNIAR, Nim 105730409813 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 125 Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Muharram 1389 H

Makassar,

14 Oktober 2017 M

PanitiaUjian:

1. PengawasUmum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim,SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) (.....) 
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM
(DekanFakultasEkonomidan Bisnis) (.....) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda.,MM
(Wakil Dekan I FakultasEkonomi) (.....) 
4. Penguji:
 - a. Dr. H. Muh. Rusydi Rahman, M.Si (.....) 
 - b. Andi Arman, SE., M.Si., Ak.CA (.....) 
 - c. Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M.Si (.....) 
 - d. Jamaluddin M, SE., M.Si (.....) 

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang –orang yang beriman di antaramu dan orang – orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al- Mujaadilah : 11)

“ Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional dan ahli) . barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla.” (HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Terkhusus untuk kedua orang tuaku, yang telah memberikan dukungan, perhatian, semangat dan do'a yang tiada hentinya.

ABSTRAK

Wahyuniar. 2017. Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai. Di bimbing oleh H. Mahmud Nuhung dan Ismail Badollahi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai periode 2011-2015 dan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sinjai periode 2011-2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu jenis data yang berupa angka- angka yang dapat diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti laporan keuangan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi . data yang di gunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015.

Setelah melakukan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai secara umum dikatakan baik. Hal ini di buktikan (a)Pendapatan Daerah rata- rata 100%, (b)Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata- rata positif 52.92%,(c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah di lihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata- rata 5,17% (rendah), rasio Ketergantungan Keuangan Relatif tinggi rata- rata 77,31%, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah secara umum rasio efektifitas rata- rata 113.45% dan rasio efisiensi rata- rata di atas 10%, (d) Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata- rata 0.4%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai secara umum dapat di katakan baik . hal ini di buktikan (a) Belanja Daerah rata- rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami perumbuhan rata- rata 16.10%,dan (c) Rasio Keserasian Belanja Daerah di lihat dari Rasio Belanja Operasi menunjukkan rata-rata 76.95%, Rasio Belanja Modal rata-rata 19.64% (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rat- rata di bawah 100%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, APBD

ABSTRACT

Wahyuniar. 2017. Performance Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget Management (APBD) of Sinjai District Government. In guidance by H. Mahmud Nuhung and Ismail Badollahi. Accounting Department Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar.

This study aims to determine the Performance of Regional Revenue Budget District Sinjai period 2011-2015 and Budget Performance Performance District Sinjai period 2011-2015.

This study is a quantitative research that is the type of data in the form of figures that can be obtained through corporate documents such as financial statements. Data collection techniques used in this study using documentation techniques. the data in use is secondary data in the form of Realization Report of Regional Budget Revenue and Expenditure District of Sinjai year 2011-2015.

After conducting the analysis, the results of the study indicate that (1) The Regional Financial Performance of Sinjai Regency is generally said to be good. (B) Local Revenue Growth averaged 52.92%, (c) Ratio of Regional Income Revenue in view of the Degrees of Decentralization showed an average of 5.17% (low), the ratio of Relatively High Financial Dependency averaged 77.31%, the Regional Effectiveness and Efficiency Ratio in general the average effectiveness ratio of 113.45% and the average efficiency ratio above 10%, (d) The degree of Contribution of BUMD reaches the average - average 0.4%. (2) Financial Performance of Regional Expenditure of Sinjai Regency in general can be said good. (a) Average regional expenditure below 100%, (b) Regional Expenditure Growth has an average growth of 16.10%, and (c) Ratio of Harmony of Regional Expenditure in view of Operating Expense Ratio shows average of 76.95 %, Capital Expenditure Ratio averaged 19.64% (d) The Efficiency of Regional Expenditure shows a mean of under 100%.

Keywords: Financial Performance, Revenue Budget, Budget Expenditure, APBD

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayahnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai.”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini Sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda Hasaning dan Ibunda Halifa yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat memberikan pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan motivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. khususnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Abdul Rahman Rahim,SE.MM selaku Rector Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong,SE.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr.H. Mahmud Nuhung,MA selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Badollahi,SE.M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II. Terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan, dan pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Ismail Badollahi,SE.M.Si.Ak.CA selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Staf karyawan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai yang bersedia memberikan bantuan untuk memperoleh data-data dan informasi terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
6. Segenap dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pengajaran, ilmu pengetahuan dan pengalaman selama peneliti menuntut ilmu.
7. Teman teman yaitu Khaerul Amri dan Wahyudin yang telah memberikan bantuan dan suport kepada penulis selama menyusun skripsi ini serta seluruh teman-teman dari Akuntansi 2-2013 tanpa terkecuali terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
8. Pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Peneliti hanya manusia biasa yang masi jauh dari sempurna. Apabila terdapat kekurangan dalam penelitian ini peneliti memohon maaf. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat bagi smua pihak.

Makassar, Oktober 2017

Penulis

Wahyuniar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Hasil Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Keuangan Daerah	8
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah	8
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	10
1. Pengertian APBD	10
2. Proses Penyusunan APBD.....	10
3. Pnyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	14

4. Klasifikasi APBD	17
C. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	22
D. Penelitian Terdahulu.....	31
E. Kerangka Fikir.....	35
F. Hipotesis.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	38
C. Defenisi Operasional Variabel.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	45
A. Sejarah Singkat Perusahaan	45
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	47
C. Struktur Organisasi	48
D. Deskripsi Jabatan	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Perhitungan dan Analisis Kinerja keuangan APBD Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015	57
C. Pembahasan	71

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2. APBD Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015.....	54
Tabel 3. Realisasi APBD Kabupaten Sinjai.....	55
Tabel 4. Realisasi Pos-Pos Pembentuk Pendapatan Daerah	55
Tabel 5. Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD	56
Tabel 6. Anggaran Pendapatan Pajak Daerah	57
Tabel 7. Analisis Pendapatan Daerah.....	58
Tabel 8. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah	59
Tabel 9. Derajat Desentralisasi	61
Tabel 10. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	62
Tabel 11. Rasio Efektifitas Pajak Daerah	63
Tabel 12. Rasio Efisiensi Pajak Daerah	64
Tabel 13. Derajat Kontribusi BUMD	66
Tabel 14. Analisis Belanja Daerah.....	67
Tabel 15. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah	68
Tabel 16. Rasio Belanja Operasi Dan Belanja Modal.....	70
Tabel 17. Analisis Efisiensi Belanja Daerah.....	71
Tabel 18. Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Sinjai	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD	12
Gambar 2.2 Kerangka Fikir.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur

yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (PP No 58 Tahun 2005).

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.104 tahun 2000 tentang dana Perimbangan.
2. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Kepemendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Keuangan daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Kemudian pemerintah juga mengeluarkan paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara/daerah beserta peraturan-peraturan turunannya yang merupakan revisi dan penyempurnaan dari UU yang sebelumnya dikeluarkan yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 32 dan 33 tahun 2004, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP), antara lain, PP No. 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan lain-lain. Khusus berkenaan dengan pengelolaan keuangan/anggaran daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut PP No. 58 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Permendagri No. 59/2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara/daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk (2016), meneliti tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Tamasoleng (2015) meneliti tentang analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pimpinan dan staf di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memahami makna penganggaran berbasis kinerja, namun mulai dari perencanaan yaitu perumusan rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) meneliti tentang Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (studi kasus Kota Malang). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang yang terus membaik.

Kabupaten Sinjai memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dapat dijadikan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Perekonomian kabupaten sinjai digerakkan oleh sektor tersier dan sekunder secara dominan yaitu sektor pertanian, perikanan perdagangan dan industri pengolahan yang dapat meningkatkan PAD. Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/pendapatan terbesar Kabupaten Sinjai adalah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan PAD-nya masih sangat kecil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah (APBD) Kabupaten Sinjai**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Anggaran Pendapatan Kabupaten Sinjai berdasarkan selama periode 2011-2015.
2. Bagaimana kinerja anggaran belanja Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan selama periode 2011-2015.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan Kabupaten Sinjai selama periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2011-2015.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis kepada pihak- pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta

menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah daerah sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah di daerah dalam menentukan arah dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di masa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

3. Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sebuah kebijakan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Menurut Mamesah dalam Halim (2004: 18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai "semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut". Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2004:20), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan

keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik (BUMD)".

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa "APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dan (f) Taat Asas".

Dengan adanya reformasi keuangan daerah terjadi perubahan mendasar pengelolaan keuangan daerah/anggaran daerah (APBD) yaitu perubahan dari *Traditional Budgeting* ke *Performance Budgeting*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuwono dkk, (2005: 63-64):

Aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budgeting* ke *performance budgeting*. *Traditional budgeting*

didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incremental*, proses penyusunan anggaran hanya berdasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya. *Performance budgeting* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember". Sedangkan, menurut Bastian (2006:189), "APBD merupakan penjawantahan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik".

Menurut Freeman dalam Nordiawan (2006: 48), "Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas". Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik menurut Nordiawan (2006: 47), "peranan penting anggaran dalam sektor publik berasal dari

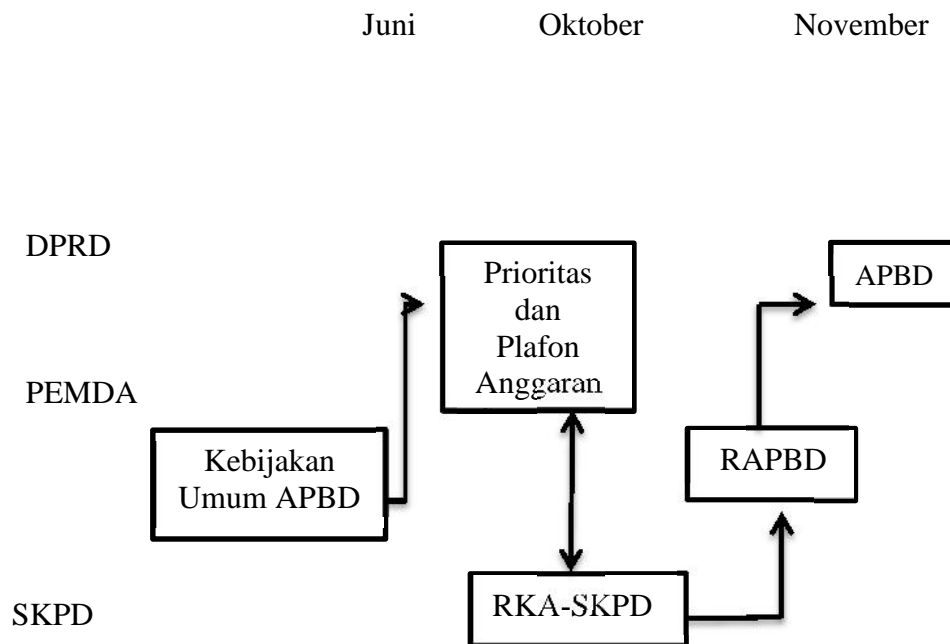
kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan".

Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

2. Proses Penyusunan APBD

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian konsensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran. Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006a: 188).

Menurut Undang-undang Nomor 17/2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, strategi dan plafon sementara yang telah ditetapkan pemerintah dan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikutnya dengan pendekatan berdasarkan kinerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. UU Nomor 17/2003 tidak mengatur proses penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD. UU Nomor 17/2003 menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda RAPBD, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Berdasarkan Pasal 186 UU Nomor 32/2004, rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perjabaran APBD.

Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

3. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kepala daerah berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pendanaannya serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.

Formulasi kebijakan anggaran harus memuat kejelasan mengenai

tujuan dan sasaran akan dicapai di tahun mendatang dan sekaligus juga, harus menjadi acuan bagi proses pertanggungjawaban (LPJ) kinerja keuangan daerah pada akhir tahun anggaran. Sedangkan pada perencanaan operasional anggaran, karena bersifat teknis, proses ini diserahkan kepada pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, sementara perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya yang tersedia pada pemerintah daerah.

Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun KUA yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Penyusunan KUA merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah (Renstra). Sementara, tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya, merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan dalam

rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

Mekanisme Penyusunan Kebijakan Umum APBD termuat dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 34 memiliki mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun
3. Kemudian Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya tersebut sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Secara teknis, proses penyusunan KUA adalah sebagai berikut:

1. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan yang disertai dengan asumsi yang mendasari.
2. Rancangan KUA tersebut disusun oleh PPKD bersama pejabat perencana daerah dan pejabat SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diordinasikan oleh sekretaris daerah yang selanjutnya disebut tim anggaran pemerintah daerah.
3. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris

daerah selaku coordinator kepada kepala daerah paling lambat pada awal bulan Juni.

4. Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD selambat-lambatnya petengahan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
5. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD untuk selanjutnya disepakati menjadi KUA.

4. Klasifikasi APBD

Adapun struktur APBD berdasarkan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari 3 bagian yaitu Pendapatan daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah".

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Kepmendagri Nomor 35 tentang pajak daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah
3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

1. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

5. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
6. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8. pendapatan denda pajak;
9. pendapatan denda retribusi;
10. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
12. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
13. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagi hasil pajak
2. Bagi hasil bukan pajak

b. Dana Alokasi Umum; dan

c. Dana Alokasi Khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Belanja terdiri dari:

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik.
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
4. Belanja Tidak Tersangka

Masing-masing Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang

sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Peneluaran –pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana
- b. Prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan
- c. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. belanja pegawai;
2. bunga;
3. subsidi;
4. hibah;
5. bantuan sosial;
6. belanja bagi basil;
7. bantuan keuangan; dan
8. belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
2. belanja barang dan jasa; dan
3. belanja modal.

C. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Bastian (2006:274), "Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi". Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat, dan dampak.

Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dalam empat bagian yaitu (Mahmudi, 2007) :

1) Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dengan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerjanya dapat dinilai baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

1. Analisis Anggaran Pendapatan Daerah

Pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran). Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*), sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (*unfavourable variance*).

2. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan. Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

3. Analisis Rasio Keuangan Daerah

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangannya.

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak.

d. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

2) Analisis Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara:

1. Analisis Anggaran Belanja daerah

Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif . Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

3. Analisis Kekeragaman Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keragaman belanja antara lain berupa :

- a. Analisis Belanja Rutin dan belanja Pembangunan terhadap Total Belanja
- b. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
- c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
- d. Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

4. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibanding tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100% . Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu untuk menunjang penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi penelitian ini, diantaranya:

Saputra dkk (2016), meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten jembran tahun 2010 – 2014. Metode analisis dengan rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk

dalam kategori efisien.

Tamasoleng (2015), meneliti tentang Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Menyatakan bahwa perumusan rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kinerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja.

Agustina (2013), meneliti tentang Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). Penelitian deskriptif menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik.

Afriyanto dan Harnita (2013), meneliti tentang analisis pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten Rokan Hulu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kecamatan pada Kabupaten Rokan Hulu.

Zahrawani (2013), meneliti tentang kinerja pengelolaan belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Pontianak pada era otonomi daerah tahun 2007-2011. Metode yang digunakan adalah metode

penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2011, dimana semua indikator menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, baik dilihat dari sisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas maupun pertumbuhan.

Brian Sagay (2013), meneliti tentang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelolah pendapatannya belum baik ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukkan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengelolah anggaran belanja sudah cukup baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang diaanggarkan.

Mandey dan Rotinsulu (2015), meneliti tentang analisis kinerja pendapatan asli daerah dikaitkan dengan belanja daerah pada pemerintah kota Bitung. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis rasio. Hasil penelitian bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun.

Zalmi (2014), meneliti tentang analisis kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2007-2012. Metode analisis yang digunakan adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya. Hasil

penelitian didapatkan kinerja keuangan daerah dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) selalu terjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya.

Heru Suprpto (2016), meneliti tentang analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kutai kartanegara tahun 2010 sampai 2014. Metode yang digunakan metode analisis deskriptif Pendapatan Dalam APBD dianalisa melalui Rasio Pajak, Pajak Perkapita, Ruang Fiscal, dan Rasio Ketergantungan Daerah, hasil penelitian dari tahun 2010 sampai Tahun 2014 menunjukkan dari empat rasio yang digunakan tiga rasio yaitu mengalami perbaikan sedangkan ruang fiscal justru mengalami penurunan.

Marliana dkk (2012), meneliti tentang analisis kinerja anggaran pada satker balai taman nasional berbak jambi. pendekatan analisis trend anggaran dan realisasi belanja, pertumbuhan anggaran, analisis proporsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan atau trend anggaran belanja dan realisasi belanja Tahun 2008-2011 mengalami kenaikan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

N0	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN DAN VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Saputra, dkk (2016)	kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten jembran tahun 2010 – 2014	Metode analisis deskriptif dengan rasio keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.
2.	Tamasoleng (2015),	Analisis Efektivitas	Metode analisis yang	Hasil penelitian ini Menyatakan bahwa

		Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	digunakan metode analisis deskriptif	perumusan rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kinerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja.
3.	Agustina (2013)	Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011).	Penelitian deskriptif menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas dan rasio pertumbuhan	Hasil penelitian ini secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang yang terus membaik.
4.	Afriyanto dan Harnita (2013)	analisis pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten Rokan Hulu.	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kecamatan pada Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Zahrawani (2013)	kinerja pengelolaan belanja pada	Metode yang digunakan adalah metode	Hasil penelitiannya menunjukkan kinerja yang baik

		anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Pontianak pada era otonomi daerah tahun 2007-2011	penelitian deskriptif.	pada tahun 2011, dimana semua indikator menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan, baik dilihat dari sisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas maupun pertumbuhan.
6.	Brian Sagay (2013)	kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Minahasa Selatan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.	Hasil dalam penelitian ini menunjukan kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengelolah pendapatannya belum baik ini dilihat dari varians pendapatan yang menunjukan belum adanya realisasi pendapatan yang mencapai target. Kinerja pemerintah dalam mengelolah anggaran belanja sudah cukup baik ini dilihat dari tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari yang diaanggarkan.
7.	Mandey dan Rotinsulu (2015)	Analisis kinerja pendapatan asli daerah dikaitkan	Metode analisis yang digunakan	Hasil penelitian bahwa kinerja pemerintah Kota

		dengan belanja daerah pada pemerintah kota Bitung	adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis rasio.	Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun.
8.	Zalmi (2014)	Analisis kinerja keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2007-2012	Metode analisis yang digunakan adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema budaya	Hasil penelitian didapatkan kinerja keuangan daerah dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) selalu terjadi peningkatan pendapatan setiap tahunnya.
9.	Heru Suprpto (2016)	Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kutai kartanegara tahun 2010 sampai 2014.	Metode yang digunakan metode analisis deskriptif Pendapatan Dalam APBD dianalisa melalui Rasio Pajak, Pajak Perkapita, Ruang Fiscal, dan Rasio Ketergantungan Daerah	Hasil penelitian dari tahun 2010 sampai Tahun 2014 menunjukkan dari empat rasio yang digunakan tiga rasio yaitu mengalami perbaikan sedangkan ruang fiscal justru mengalami penurunan.
10	Marliana, dkk (2012)	Analisis kinerja anggaran pada satker balai taman nasional berbak jambi	Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis trend anggaran dan realisasi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan atau trend anggaran belanja dan realisasi belanja Tahun 2008-2011

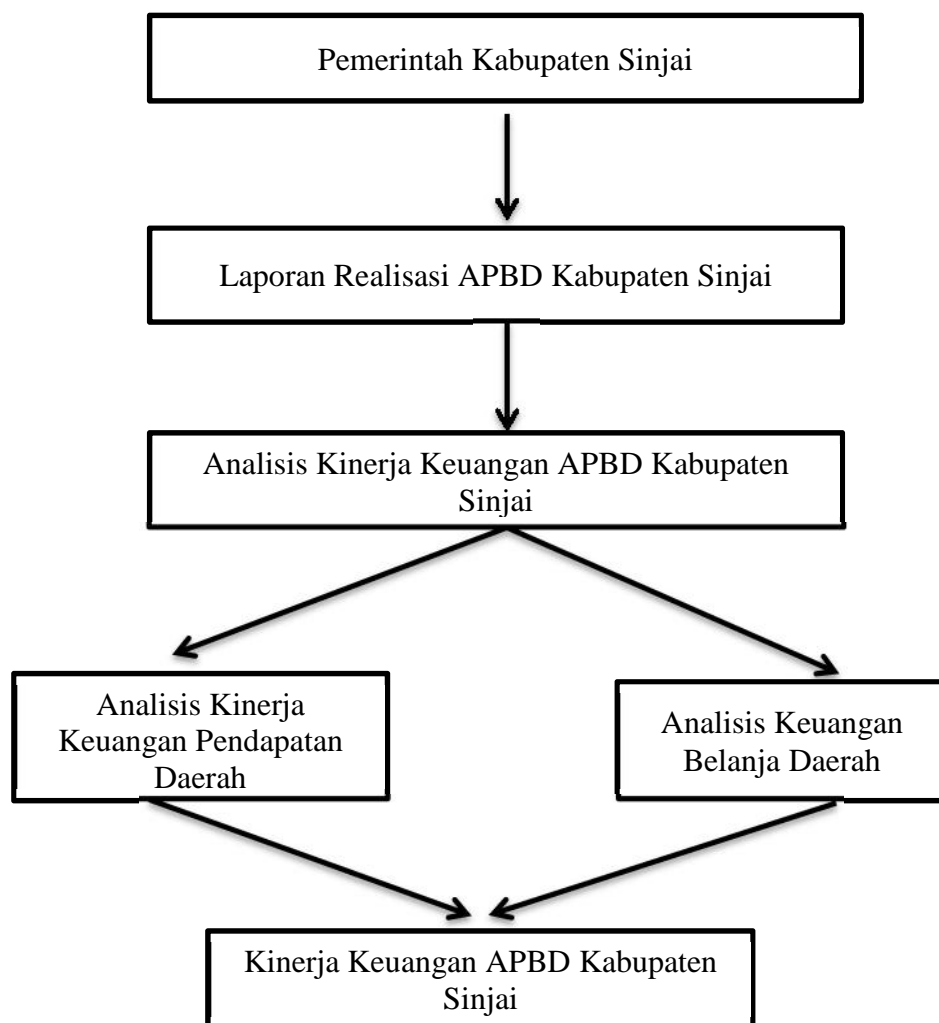
			belanja, pertumbuhan anggaran, analisis proporsional	mengalami kenaikan.
--	--	--	--	------------------------

E. Kerangka Fikir

Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah daerah maka kinerja keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan seberapa efisinnya daerah untuk memeberikan pelayanan pada masyarakat. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu dan menyediakan cara tepat secara berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja keuangan.

Analisis kinerja keuangan APBD dapat dilakukan dengan dua bagian, yaitu analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dan analisis kinerja keuangan belanja daerah. Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dapat menunjukkan seberapa besar tingkat kemandirian suatu daerah. Tingginya tingkat kemandirian daerah maka semakin baik juga kualitas pelayanan publiknya. Analisis kinerja keuangan belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan APBD. Berdasarkan pada laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan analisis kinerja keuangan belanja daerah.

Melihat kinerja keuangan pendapatan daerah dan kinerja keuangan belanja daerah, maka dapat dinilai kinerja keuangan APBD secara umum, jika semua kinerja keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan kinerja keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan kinerja keuangan APBD adalah baik.



Gambar 2.2 Kerangka Fikir

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesisnya dalam penelitian ini adalah diduga bahwa kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sinjai periode 2011-2015 menunjukkan angka yang sesuai target dan sudah berjalan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dengan mengambil data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD).

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu jenis data yang berupa angka-angka yang dapat diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti laporan keuangan.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu (*time series*) yaitu APBD dan laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten Sinjai (2011-2015).

C. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Kinerja Keuangan Daerah dapat terlihat dari dua hal utama, hal tersebut berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran, sering juga disebut pendapatan dan belanja.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dikelola dalam APBD. Jadi APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka di gunakan metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan adalah pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti dengan mnempuh cara berikut:
 - a. Observasi, dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
 - b. Dokumentasi , pengumpulan data di peroleh dari kantor keuangan daerah berupa laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun anggaran (2011-2015)
2. Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca atau mempelajari buku- buku literature lainnya yang erat hubungannya masalah yang diteliti.

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Berdasarkan laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

1. Analisis anggaran pendapatan daerah
2. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan positif dikatakan kinerja keuangan pendapatan cenderung meningkat, sedang pertumbuhan negatif dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan (Mahmudi, 2010).

$$\text{Pertumbuhan PAD tahun } t = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } t - 1}{\text{PAD tahun } t - 1} \times 100\%$$

3. Analisis rasio keuangan pendapatan daerah

- a. Rasio derajat desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan Keuangan Daerah di hitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang di terima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2010). Menurut Kementrian Keuangan (2011), jika Rasio Ketergantungan Keuangan daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektifitas pajak dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100%. Sama halnya dengan analisis efisiensi PAD, untuk dapat menghitung rasio efisiensi pajak daerah diperlukan data tentang biaya pemungutan pajak.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk rumus rasio efisiensi adalah:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya pemungutan pajak daerah}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

d. Derajat kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

1. Analisis Belanja Daerah
2. Analisis pertumbuhan belanja daerah

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

3. Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang di alokasikan untuk belanja yang di gunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis Keserasian Belanja

Daerah meliputi:

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi Belanja Daerah yang di alokasikan untuk belanja operasi. Belanja Operasi adalah belanja yang manfaatnya dapat habis di konsumsi dalam satu tahun anggaran. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi belanja daerah, yaitu 60-90 persen.(Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat di gunakan untuk mengetahui proporsi belanja daerah yang di alokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Analisis efisiensi belanja daerah

Rasio dalam analisis efisiensi belanja daerah ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen. Sebaliknya jika lebih dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran

(Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Sinjai

Pada awalnya dulu Kantor Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sinjai berdiri sendiri yang berpedoman pada keputusan Gubernur Sul-Sel sejak tahun 1950. Dengan keadaan kantor yang masih memadai sarana dan prasarananya, dengan jumlah staf yang banyak sehingga mempermudah penyelesaian pekerjaan. Tetapi sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 35 Tahun 2008 maka Kantor BPKAD dijadikan satu dengan kantor dinas yang lainnya yang diantaranya Kantor Dinas Anggaran dan Perbendaharaan, Kantor Dinas Keuangan, dan Kantor Dinas Pengelolaan Aset Daerah. Tetapi karena ada Peraturan Bupati tahun 2008 maka kantor-Kantor dinas tadi dijadikan satu dalam satu wadah yaitu Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Yang dimana nantinya kantor-kantor Dinas tadi dipilah-pilah sesuai dengan bidangnya. Untuk segala aktifitas , jumlah staf dan sarana dan prasarana juga terbatas karena adanya penggabungan kantor tersebut. Sejak turunnya Surat Bupati Sinjai, maka secara resmi Kantor BPKAD menjadi Bidang Pendapatan. Dan mulai saat itu, terdapat beberapa bidang yang diantaranya terdiri dari :

- a. Bidang Anggaran
- b. Bidang Perbendaharaan
- c. Bidang Verifikasi
- d. Bidang Akuntansi

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah, diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dan dalam rangka upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kewenangan pemerintah yang antara lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, sementara kewenangan propinsi yang diatur pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 menetapkan kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, dengan demikian kewenangan kabupaten adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara makro.

Berdasarkan pertimbangan diatas, pengaturan tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan karenanya perlu ditinjau kembali.

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan implikasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui penggalian dan pengembangan sumber daya daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah itu sendiri. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan partisipasi aktif warga masyarakat daerah. Dengan kata lain, diperlukan penggalangan solidaritas warga daerah agar merasa ikut memiliki, berkewajiban untuk membangun, ikut merasakan hasilnya, dan akhirnya memiliki kebanggaan dan kesetiaan kepada daerahnya. Salah satu bentuk penggalangan solidaritas adalah adanya penulisan identitas daerah.

B. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

1. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Sinjai

- a. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang profesional dan prima dalam pelayanan”
- b. **Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sinjai**
 - a. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi
 - b. Meningkatnya pengelolaan asset daerah
 - c. Meningkatnya sarana prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

C. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan dan tanggungjawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, makaseluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Sinjai berbentuk Stuktur Organisasi Garis dan Staf. Dimana jabatan tertinggi Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris Dinas. Sekretaris Dinas sendiri membawahi beberapa Sub- Sub Bagian, yang terdiri dari Sub Bag Perencanaan, Sub Bag Keuangan , dan Sub Bag Umum dan Kepegawaian. Dalam struktur organisasi ini terdapat 4 (empat) bidang yang setiap bidangnya dipimpin oleh kepala bidang masing – masing dimana mereka berada di bawah Kepala Dinas.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari

- a. Sekretariat :
 1. Sub Bagian program
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Bagian umum dan kepegawaian
- b. Bidang Anggaran :
 1. Sub Bidang Penyusunan APBD
 2. Sub Bidang penyusunan kebijakan dan penyusunan anggaran
 3. Sub bidang penyusunan dan evaluasi anggaran
- c. Bidang Perbendaharaan :

1. Sub Bidang perbendaharaan kas daerah
 2. Sub bidang perbendaharaan belanja I
 3. Sub bidang perbendaharaan belanja II
- d. Bidang Akuntansi :
1. Sub bidang akuntansi pendapatan dan belanja keuangan
 2. Sub bidang akuntansi asset
 3. Sub bidang pelaporan
- e. Bidang Aset Daerah :
1. Sub bidang analisa kebutuhan dan inventarisasi
 2. Sub bidang pengamanan dan pemanfaatan
 3. Sub bidang penilaian dan penghapusan

D. Deskripsi Jabatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kab. Sinjai

Deskripsi jabatan menjadi sarana pengawasan atasan terhadap bawahan, bahan penyusunan pendidikan organisasi, penyederhanaan sistem kerja dan proses kerja perencanaan staf.

Tugas pokok dan Fungsi serta uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sinjai.

Kepala Badan

Kepala Badan ,mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan ;

2. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Jabatan : Sekretariat

Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Jabatan : Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Anggaran, mempunyai tugas :

1. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Anggaran.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Anggaran.

3. Bidang Perbendaharaan

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan fungsi Akuntansi Penerimaan, Akuntansi Pengeluaran, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

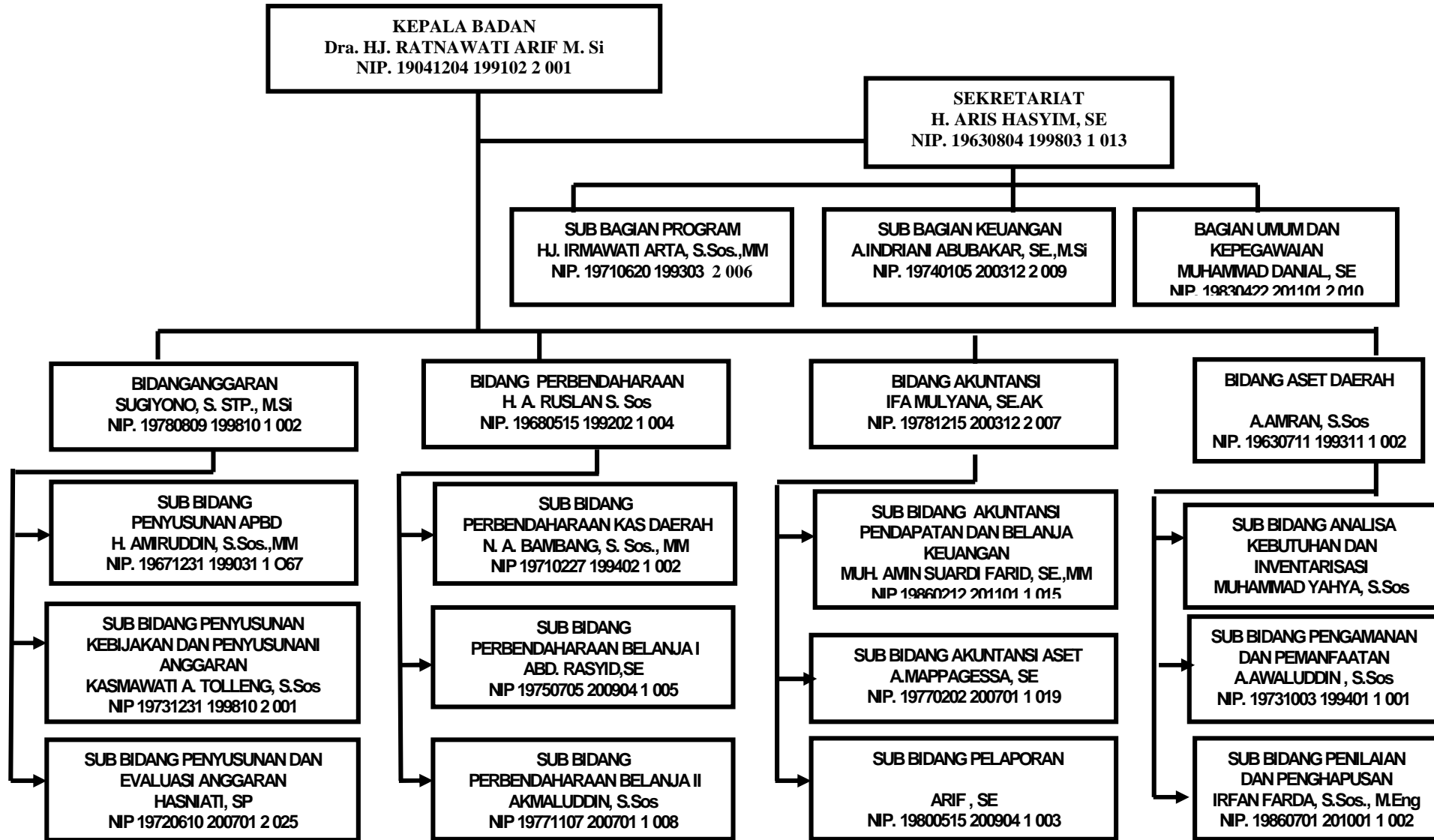
E. Aspek Aktivitas Perusahaan

Gambaran aktivitas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (SUL-SEL) adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan sasaran pembangunan serta pengembangan PEDAPATAN, pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Mengkoordinasikan kegiatan pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian, serta akta pengakuan dan pengesahan anak.
4. Mengarahkan kegiatan pengelolaan data dan pencatatan mutasi penduduk
5. Mengarahkan kegiatan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Menyusun standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah
6. Mengusulkan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
7. Menetapkan pedoman evaluasi anggaran pendapatan dan belanja (APB) desa sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah

8. Menetapkan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi dan retribusi daerah, keseimbangan fiskal antar desa, pengelolaan investasi dan asset daerah, kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, Kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
9. Menyelenggarakan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kabupaten
10. Menyelenggarakan pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten, penyiapan Data realisasi penerimaan DBH kabupaten
11. Membina kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dilingkungan pemerintah kabupaten
12. Membina dan mengarahkan personalia, perlengkapan, keuangan dan dokumen dinas
13. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN DAN ASET KEUANGAN DAERAH KAB. SINJAI
 (Perda Nomor 5 Tahun 2016)



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2015

Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Sinjai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Peraturan Daerah

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Sinjai. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus di catat dalam APBD.

Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011- 2015

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah .

Berikut ini merupakan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011- 2015:

Tabel 2.

APBD Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)

Tahun	APBD		Surplus/ Defisit
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	
2011	579,196,939,085	556,120,118,990	23,076,820,094
2012	573,980,458,191	586,731,213,661	(12,750,755,470)
2013	655,418,136,813	686,776,210,245	(31,358,073,432)
2014	781,780,557,569	840,804,420,269	(59,023,862,700)
2015	987,023,084,226	1,073,450,554,896	(86,427,470,669)

Sumber : BPKAD Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2015, APBD Kabupaten Sinjai lebih memperbanyak anggaran belanja dari pada anggaran pendapatan.

Tabel 3.
Realisasi APBD Kabupaten Sinjai 2011-2015 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi APBD		Surplus/ Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	
2011	578,312,835,154	527,680,265,062	50,632,570,091
2012	575,936,851,549	555,073,238,921	20,863,612,628
2013	662,485,048,302	633,158,289,351	29,326,758,951
2014	782,995,287,787	761,671,439,876	21,323,847,911
2015	985,110,700,579	926,688,086,441	58,422,614,138

Sumber : BPKAD Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2015 pemerintah daerah mengalami surplus.

c. Pendapatan daerah

Menurut Abdul Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

Tabel 4.
Realisasi pos-pos pembentuk pendapatan daerah (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan transfer	Lain- lain pendapatan yang sah
2011	17,509,803,128	423,508,225,912	137,294,806,113
2012	21,834,740,641	481,981,442,901	72,120,668,007
2013	24,044,536,48	548,356,687,603	90,083,824,217
2014	46,404,259,984	595,871,036,697	140,719,991,106
2015	75,599,713,319	721,962,706,908	187,548,280,352
Total	185,393,053,556	2,771,680,100,031	627,767,569,796

Sumber : BPKAD Kab. Sinjai

d. Pendapatan Bagian Laba BUMD

Pendapatan bagian laba BUMD adalah pos penyusuna hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan . BUMD yang memiliki kontribusi terhadap pendapatn daerah kabupaten Sinjai.

Berikut ini merupakan tabel pendapatan bagian laba BUMD Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015:

Tabel 5.

Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD Kabupaten Sinjai (dalam rupiah)

Tahun	Anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD	Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD
2011	2,300,000,000	2,319,144,577
2012	2,300,000,000	2,327,025,979
2013	2,587,719,012	2,587,719,012
2014	3,107,719,012	3,108,716,331
2015	4,442,531,837	4,442,531,837
Total	14,737,969,861	14,785,137,736

Sumber :BPKAD Kab. Sinjai

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan total anggaran yang di buat pemerintah daerah untuk laba BUMD sebesar Rp. 14,737,969,861.68, sedang untuk realisasi yang dapat di peroleh dari BUMD sebesar Rp. 14,785,137,736.55.

e. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berikut ini merupakan tabel Pajak Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012:

Tabel 6.
Anggaran pendapatan pajak daerah (dalam rupiah)

Tahun	Target penerimaan pajak daerah	Realisasi pendapatan pajak daerah
2011	2,984,370,000.00	3,035,576,248.00
2012	3,940,000,000.00	3,621,248,360.00
2013	3,846,200,000.00	4,577,272,246.00
2014	8,170,200,000.00	9,318,073,340.00
2015	8,706,250,000.00	10,812,469,620.00
Total	27,647,020,000.00	31,364,639,814.00

Sumber : BPKAD Kab. Sinjai

Dari tabel 6 di atas menunjukkan total target penerimaan pajak Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 27,647,020,000.00. Pada lima tahun yang bersangkutan realisasi pajak daerah mencapai Rp. 31,364,639,814.00.

B. Perhitungan dan Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015

1. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015

Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah Kabupaten Sinjai secara umum menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan daerah dikatakan baik, tetapi masih kurang dalam penyelenggaraan

desentralisasi dan terdapat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, serta dalam pemungutan pajak daerah belum efisien.

a. Analisis Pendapatan Daerah

Berikut ini tabel perhitungan Pendapatan Daerah:

Tabel 7.

Analisis Pendapatan Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan		Persentase Realisasi APBD
	ANGGARAN	REALISASI	
2011	579,196,939,085	578,312,835,154	99.85%
2012	573,980,458,191	575,936,851,549	100.24%
2013	655,418,136,813	662,485,048,302	101.08%
2014	781,780,557,569	782,995,287,787	100.16%
2015	987,023,084,226	985,110,700,579	99.81%
TOTAL	3,577,399,175,884	3,584,840,723,373	100.21%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 5. Di atas secara umum di lihat dari analisis Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dapat di katakan baik. Hal ini di tunjukkan dengan rata- rata persentase Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah sebesar 100.21%. persentase tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 101.08%, sedang persentase terendah yaitu tahun 2015 99.81%

b. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran kinerja keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD tahun } t = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } t - 1}{\text{PAD tahun } t - 1} \times 100\%$$

Pertumbuhan pendapatan Daerah pada tahun 2011-2015 di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 8.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015

(dalam rupiah)

Tahun	PAD tahun $t-1$	PAD tahun t	Persentase Pertumbuhan
2011-2012	17,509,803,128	21,834,740,641	24.70%
2012-2013	21,834,740,641	24,004,536,482	9.93%
2013-2014	24,004,536,482	46,404,259,984	93.31%
2014-2015	46,404,259,984	75,599,713,319	62.91%
Total	109,753,340,235	167,843,259,426	52.92%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 8 di atas, kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015 di

katakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini di tunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 52.92%. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu 93.31% sedang pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2012-2013 yaitu 9.93%.

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

1. Derajat desentralisasi

Derajat desentralisasi di hitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut artikel yang di terbitkan menteri keuangan (2011), jika derajat desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat desentralisasi} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9
Derajat Desentralisasi (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan asli daerah	Total pendapatan daerah	Derajat desentralisasi (%)
2011	17,509,803,128	578,312,835,154	3,03%
2012	21,834,740,641	575,936,851,549	3.80%
2013	24,044,536,482	662,485,048,302	3.63%
2014	46,404,259,984	782,995,287,787	5.92%
2015	75,599,713,319	985,110,700,579	7.67%
Total	185,393,053,556	3,584,840,722,373	5.17%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa derajat desentralisasi Kabupaten Sinjai tahun 2011- 2015 rendah dengan rata rata derajat desentralisasi sebesar 5.17 %. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 7.67%, sedangkan derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 3.03%, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pemerintah daerah belum mampu menyelenggarakan desentralisasi.

2. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah di hitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Menurut artikel yang di terbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika rasio ketergantungan keuangan daerah berada di bawah 50% bereti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Berikut ini

merupakan rumus perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Pendapatan transfer	Total pendapatan daerah	Rasio ketergantungan keuangan daerah
2011	423,508,225,912	578,312,835,154	73.23%
2012	481,981,442,901	575,936,851,549	83.68%
2013	548,356,687,603	662,485,048,302	82.77%
2014	595,871,036,697	782,995,287,787	76.11%
2015	721,962,706,908	985,110,700,579	73.28%
Total	2,771,680,100,021	3,584,840,723,373	77.31%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat di katakan bahwa tngkat ketergantungan Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015 tinggi yang di tunjukkan dengan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 77.31% . tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 83.68%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 73.23% . hasil menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

3. Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah

Rasio efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah. Rasio efektifitas pajak di anggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100%, sedang rasio efisiensi pajak di katakan baik jika kurang dari 10% . rumus perhitungan rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Sinjai 2011- 2015:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas Pajak Daerah di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11.

Rasio efektivitas pajak daerah (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi pendapatan pajak daerah	Target penerimaan pajak daerah	Rasio efektifitas pajak daerah
2011	3,035,576,248	2,984,370,00	101.71%
2012	3,621,248,360	3,940,000,000	91.90%
2013	4,577,272,246	3,846,200,000	119.07%
2014	9,318,073,340	8,170,200,000	114.04%
2015	10.812,469,620	8,706,250,000	124.19%
Total	31,364,639,814	27,647,020,000	113.45%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel di atas rasio efektivitas pajak daerah di anggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 100 persen. Pada tahun 2011 menunjukkan angka 101.71% berarti pada tahun ini penerimaan pajak daerah telah sesuai target yang di anggarkan. Lain halnya pada tahun 2012 pada

tahun ini penerimaan daerah masih kurang baik karena dalam perbandingan antara penerimaan dan target menunjukkan angka 91.90% masih belum memenuhi syarat minimal 100%. Pada tahun 2013 sampai 2015 penerimaan pajak telah efektif dengan persentase terhadap target penerimaan sebesar 119.07% dan 114.04% dan juga 124.19%. jika di lihat secara umum, rata-rata rasio efektivitas lima periode tersebut dapat di katakan baik karena mencapai angka rata- rata sebesar 113.45%.

Berikut rumus perhitungan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Sinjai 2011-2015 sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya pemungutan pajak daerah}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Pajak Daerah di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12.

Rasio efisiensi pajak daerah (dalam rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah	Rasio Efisiensi Pajak Daerah
2011	51,206,248	3,035,576,248	1.68%
2012	318,751,640	3,621,248,360	8,80%
2013	731,072,246	4,577,272,246	15.97%
2014	1,147,873,340	9,318,073,340	12.31%
2015	2,106,219,620	10,812,469,620	19.47%
Total	4,355,123,094	31,364,639,814	13.88%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 10 di atas Rasio efisiensi Pajak Daerah di anggap baik apabila persentase kurang dari 10%. Pada tahun 2011 dan 2012 sudah terjadi efisiensi untuk kinerja keuangan daerah dalam pemungutan pajak ini terlihat dari rasio efisiensi paja daerah yang mencapai 1.68% dan 8.80%. pada tahun 2013 rasio efisiensi pajak daerah mengalami kenaikan menjadi 15.97%, ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak kurang baik. Sedangkan pada tahun 2014 rasio efisiensi pajak daerah hampir sama seperti tahun 2013 yaitu 12.31% tetapi belum bisa di katakn baik karena belum mendekati 10%. Pada tahun 2015 pemerintah daerah dalam melakukan pengumpulan pajak belum efisien karena belum di bawah 10%. Secara umum rasio efisiensi Pajak Daerah belum di katakan efisiensi. Hal ini di tunjukkan dengan angka rata- rata ini mencapai 13.88%.

4. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0% maka di katakan perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berikut rumus perhitungan Derajat Kontribusi BUMD yaitu:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Kontribusi BUMD di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13.
Derajat Kontribusi BUMD (dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan Bagian Laba BUMD	Penerimaan Pendapatan Daerah	Derajat Kontribusi BUMD
2011	2,319,144,577	578,312,835,154	0.40%
2012	2,327,025,979	575,936,851,549	0.40%
2013	2,587,719,012	662,485,048,302	0.38%
2014	3,108,716,331	782,995,287,787	0.39%
2015	4,442,531,837	985,110,700,579	0.45%
Total	14,785,137,736	3,584,840,723,373	0.4%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan perhitungan derajat kontribusi BUMD di atas menunjukkan bahwa kontribusi BUMD untuk pendapatan daerah secara umum mencapai angka 0.4%. kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0.45%, sedang kontribusi BUMD Terjadi pada tahun 2013 yaitu 0.38%. dari hasil ini memperlihatkan bahwa derajat kontribusi BUMD setiap tahunnya lebih dari 0% sehingga dapat di katakan bahwa perusahaan daerah telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah.

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015

a. Analisis Belanja Daerah

Berikut ini tabel perhitungan analisis belanja daerah Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015:

Tabel 14.

Analisis Belanja Daerah (dalam rupiah)

Tahun	Belanja		Persentase Realisasi APBD
	ANGGARAN	REALISASI	
2011	556,120,118,990	527,680,265,062	94.89%
2012	586,731,213,661	555,073,238,921	94.60%
2013	686,776,210,245	633,158,289,351	92.19%
2014	840,804,420,269	761,671,439,876	90.59%
2015	1,073,450,554,896	926,688,086,441	86.33%
TOTAL	3,742,882,518,063	3,404,271,319,652	90.95%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 14, Analisis Belanja Daerah pada tahun 2011-2015 terlihat realisasi tidak ada yang melebihi dari anggaran belanja. Secara umum di lihat dari analisis belanja daerah, kinerja keuangan Kabupaten Sinjai dapat di katakan baik. Hal ini di tunjukkan dengan angka rata- rata persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah mencapai 90.95%. realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 94.89% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 86.33%.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } t-1}{\text{Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

Pertumbuhan pendapatan Daerah pada tahun 2011-2015 di peroleh dari hasil perhitungan pada data keuangan Daerah, di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15.

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2011-2015

(dalam rupiah)

Tahun	Belanja tahun _{t-1}	Belanja tahun _t	Persentase Pertumbuhan
2011-2012	527,680,265,062	555,073,238,921	5.19%
2012-2013	555,073,238,921	633,158,289,351	14.06%
2013-2014	633,158,289,351	761,671,439,876	20.29%
2014-2015	761,671,439,876	926,688,086,441	21.66%
Total	2,477,583,233,210	2,876,591,054,589	16.10%

Sumber : Data Diolah (2017)

Dari tabel perhitungan di atas Kinerja Keuangan Belanja Daerah di lihat dari Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini di tunjukkan dengan rata-rata 16.10%. pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015 yaitu 21.66%. sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu 5.19%.

c. Analisis Rasio Keserasian Belanja

1. Rasio Belanja Operasi terhadap APBD dan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja.

Rumus untuk menghitung rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan:

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja di peroleh dari hasil perhitungan rumus di atas , yang di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 16.

Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2011-2015

Tahun	Rasio belanja operasi terhadap total belanja	Rasio belanja modal terhadap total belanja	Rasio keserasian %	
			Belanja operasi	Belanja modal
2011	390,153,084,675	119,060,938,531	73.93%	22.56%
	527,680,265,062	527,680,265,062		
2012	445,403,934,828	88,940,870,483	80.24%	16.02%
	555,073,238,921	555,073,238,921		
2013	505,170,370,686	108,183,931,664	79.78%	17.08%
	633,158,289,351	633,158,289,351		
2014	585,410,664,640	157,488,434,836	76.85%	20.67%
	761,671,439,876	761,671,439,876		
2015	693,745,866,823	195,122,366,487	74.86%	21,05
	926,688,086,441	926,688,086,441		
Rata-Rata			76.95%	19.64%

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel perhitungan di atas dapat di lihat bahwa selama tahun 2011-2015 sebagian besar dana yang di alokasikan dari total belanja lebih besar untuk belanja operasi di bandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil. Selama tahun 2011-2015 rata-rata belanja operasi sebesar 76.95% sedangkan untuk belanja modal sebesar 19.64%. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBD lebih besar di alokasikan untuk belanja yang manfaatnya habis di konsumsi dalam satu tahun anggaran. Menurut Mahmudi (2010:164) pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi di bandingkan dengan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang memiliki pendapatan tinggi.

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio efisiensi belanja daerah ini di gunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang di lakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di nilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya urang dari 100%. Sebaliknya jika lebih dari 100% mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Berikut ini tabel perhitungan analisis efisiensi belanja daerah tahun 2011-2015.

Tabel 17.
Analisis Efisiensi Belanja Daerah tahun 2011-2015(dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2011	527,680,265,062	556,120,118,990	94.89%
2012	555,073,238,921	586,731,213,661	94.60%
2013	633,158,289,351	686,776,210,245	92.19%
2014	761,671,439,876	840,804,420,269	90.59%
2015	926,688,086,441	1,073,450,554,896	86.33%

Sumber : Data Diolah (2017)

Dari tabel perhitungan di atas terlohat bahwa realisi anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2011-2015 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% sehingga dapat di artikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja dalam lima tahun tersebut.

C. Pembahasan

Ringkasan hasil penelitian mengenai Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 18.

Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Sinjai

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
A	Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah	
	1. Analisis Pendapatan Daerah	100.21%
	2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah	52.92%
	3. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah :	
	a. Derajat Desentralisasi	5.17%
	b. Rasio Ketergantungan Keuangan	77.31%
	c. Rasio Efektifitas Pajak	113.45%
	d. Rasio Efisiensi Pajak	13.88%
	e. Derajat Kontribusi BUMD	0.4%
B	Kinerja Keuangan Belanja Daerah	
	1. Analisis Belanja Daerah	90.95%
	2. Analisis Pertumbuhan Belanja	16.10%
	3. Analisis Rasio Keserasian Belanja:	
	a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	76.95%
No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
	b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja	19.64%
	4. Analisis Efisiensi Belanja	<100%

Sumber : Data Diolah (2017)

1. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan pendapatan Kabupaten Sinjai selama periode 2011-2015 yang meliputi:

a. Analisis Pendapatan Daerah

analisis pendapatan Daerah secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dapat dikatakan baik.. Di tunjukkan dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2011-2015 memiliki angka rata- rata sebesar 100.21%. jika di lihat dari lima periode yang di teliti, maka persentase

paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai angka 101.08% sedang persentase paling rendah terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai angka 99.81%. Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang di kemukakan oleh Mahmudi (2010:137) yaitu Pemerintah Kabupaten di katakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang di anggarkan.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja keuangan pendapatan cenderung meningkat jika mengalami pertumbuhan secara positif, sedang di katakan kinerja keuangan pendapatan mengalami penurunan jika mengalami pertumbuhan secara negatif (Mahmudi 2010). Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan kinerja keuangan pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 52.92%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu 93.31% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahu 2012 yaitu 9.93%. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:138), bahwa jika terjadi pertumbuhan yang positif maka menunjukkan terjadi peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan.

c. Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis rasio keuangan pendapatan daerah menunjukkan secara umum kinerja keuangan pendapatan Kabupaten Sinjai berdasarkan :

1. Derajat Desentralisasi

Artikel yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2011) menyebutkan jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi Kabupaten Sinjai menunjukkan angka rata-rata 5.17% sehingga dapat dikatakan rendah. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 7.67%, sedang derajat desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 3.03%. Hasil mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:142) bahwa semakin rendah kontribusi PAD maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Artikel Kementerian Keuangan (2011) menjelaskan jika rasio ketergantungan keuangan daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sinjai menunjukkan angka rata-rata sebesar 77.31%. tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 83.68%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2011

yaitu 73.23%. angka di atas 50% memperlihatkan bahwa Kabupaten Sinjai masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendukung pendapat Mahmud (2010:142) bahwa semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat.

3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektifitas pajak di anggap baik apabila rasio ini mencapai angka 100%, sedang rasio efisiensi pajak di katakan baik apabila kurang dari 10%. Rasio efektifitas dan efisiensi pajak daerah pada tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015 menunjukkan pemerintah Kabupaten Sinjai telah melakukan efektifitas pajak , sedangkan tahun 2012 pemerintah Kabupaten Sinjai belum efektif dalam penanganan pajak daerah. Secara umum pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan angka rata-rata 113.45% untuk rasio efektifitas. Pemerintah daerah pada lima tahun ini belum efisien dalam pemungutan pajak karena secara umum Pemerintah Kabupaten Sinjai menunjukkan angka rata-rata di atas 10% untuk rasio efisiensi. Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengelola pajak daerah telah efektif tetapi belum efisien.

4. Derajat Kontribusi BUMD

Jika di lihat dari derajat kontribusi BUMD, perusahaan daerah di katakan telah memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah jika rasio ini menunjukkan angka di atas 0%. Derajat kontribusi BUMD Kabupaten Sinjai menunjukkan angka rata-rata lebih dari 0% yaitu 0.4%. Kontribusi BUMD tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 0.45% sedang kontribusi BUMD terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 0.38%. Hal ini menunjukkan bahwa BUMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Sinjai telah memiliki kontribusi terhadap besarnya pendapatan daerah Kabupaten Sinjai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa , secara umum Kinerja Keuangan Pendapatn Daerah Kabupaten Sinjai dapat di katakan baik. Meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan pemungutan pajak daerah belum efisien.

2. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2011-2015 yang meliputi:

a. Analisis Belanja Daerah

Jika analisis belanja daerah menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan belanja daerah Kabupaten Sinjai dapat dikatakan Baik. Hal ini di tunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi

anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja dari tahun 2011-2015 yang mencapai angka rata-rata 90.95%. realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu 94.89%, sedang realisasi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu 86.33%. Hasi ini juga mendukung pendapat yang dikemukakan Mahmudi (2010:157) yaitu pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan belanja yang baik apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang ditargetkan.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Kenaikan belanja daerah dikatakan wajar atau tidak perlu melihat inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, penyesuaian faktor makro ekonomi dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relatif terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang di luar kendali pemerintah daerah (Mahmudi, 2010). Secara umum analisis pertumbuhan belanja daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sinjai mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 16.10%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014- 2015 yaitu 21.66%, sedang pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011-2012 yaitu 5.19%.

c. Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah umumnya menunjukkan bahwa proporsi Belanja Operasi mendominasi total Belanja Daerah, yaitu antara 60-90 persen dan proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja

Daerah antara 5-20 persen (Mahmudi: 2010). Analisis Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah di alokasikan untuk belanja operasi, dan hanya beberapa persen di alokasikan untuk belanja modal. Selama tahun 2011-2015 rata-rata belanja operasi sebesar 76.95% sedang untuk belanja modal sebesar 19.64%. Hasil ini juga dapat di katakan bahwa Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai pendapatan tinggi.

d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Pemerintah daerah di nilai dari analisis efisiensi belanja daerah, di katakan telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 persen, sebaliknya jika kurang dari 100 persen mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010). Analisis efisiensi belanja daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Sinjai telah melakukan efisiensi belanja untuk tahun 2011-2015. Hal ini di tunjukkan dengan realisasi anggaran belanja Kabupaten Sinjai yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:166) jika angka yang di hasilkan dari rasio kurang dari 100% maka di nilai telah melakukan efisiensi anggaran.

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai dapat di katakan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra,dkk (2016), Tamasoleng (2015), Agustina (2013), Zahrawani (2013), Brian Sagay (2013) yang hasil penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan rasio keuangan secara umum menunjukkan hasil kinerja keuangan daerah sesuai yang di harapkan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Hasil kinerja keuangan pendapatan daerah secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Pendapatan Daerah rata-rata 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata positif 52.92%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 5,17% (rendah), rasio Ketergantungan Keuangan Relatif tinggi rata-rata 77,31%, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah secara umum rasio efektifitas rata-rata 113.45% dan rasio efisiensi rata-rata di atas 10%, (d) Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0.4%.

2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Hasil kinerja keuangan belanja daerah secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 16.10%, dan (c) Rasio Keserasian Belanja Daerah dilihat dari Rasio Belanja Operasi menunjukkan rata-rata

76.95%, Rasio Belanja Modal rata-rata 19.64% (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai
 - a. Kabupaten Sinjai perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kabupaten Sinjai. Efisiensi akan meningkat jika Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki kontribusi kecil dalam PAD. Ada juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD oleh yang bersangkutan.
 - b. Angka ketergantungan yang masih tinggi juga merupakan masalah dalam Pemerintah Kabupaten Sinjai, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Sinjai perlu menggali lebih dari guna mencari beberapa potensi dari masyarakat maupun alam untuk meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah Kabupaten Sinjai.

2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2011-2015. Di harapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja Pemerintah Kabupaten Sinjai.
 - b. Peneliti selanjutnya di sarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena penelitian ini mengambil satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Sinjai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, 2013. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Malang)*. Hal 4.
- Afriyanto, dan Harnita, 2013. *Analisis Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu*. Hal 11.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Erlina, Sri Mulyadi, 2007. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. USU Press, Medan.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Jumingan, 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marliana, dkk. 2012. *Analisis Kinerja Anggaran Pada Satker Balai Taman Nasional Berbak Jambi*. Vol 1. Hal 36.
- Mandey, dan Rotinsulu. 2015. *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Vol 3. Hal 832.
- Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Saputra, dkk, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah di Kabupaten Jembrana.*
- Sagay, Brian, 2013. *Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Minahasa Selatan. Vol 1. Hal 1170.*
- Suprpto, Heru, 2016. *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Vol 16. Hal 49.*
- Tamasoleng, 2015. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Vol 3. Hal 102.*
- Yuwono, S.I.T, Agus. dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja). Bayumedia Publishing. Malang*
- Zahrawani, 2013. *Kinerja Pengelolaan Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Kota Pontianak. Hal 3.*
- Zalmi, 2014. *Analisa Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Vol 2. Hal 110.*

Tabel pos-pos Realisasi APBD

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Daerah (PD)	578,312,835,154	575,936,851,549	662,485,048,302	782,995,287,787	985,110,700,579
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17,509,803,128	21,834,740,641	24,044,536,482	46,404,259,984	75,599,713,319
Pendapatan Transfer (PT)	423,508,225,912	481,981,442,901	548,356,687,603	595,871,036,697	721,962,706,908
Realisasi Pajak Daerah (RPD)	3,035,576,248	3,621,248,360	4,577,272,246	9,318,073,340	10.812,469,620
Target Pajak Daerah (TPD)	2,984,370,00	3,940,000,000	3,846,200,000	8,170,200,000	8,706,250,000
Biaya Pemungutan Pajak Daerah (BPPD)	51,206,248	318,751,640	731,072,246	1,147,873,340	2,106,219,620
Bagian Laba BUMD(BL)	2,319,144,577	2,327,025,979	2,587,719,012	3,108,716,331	4,442,531,837
Belanja Operasi(BO)	390,153,084,675	445,403,934,828	505,170,370,686	585,410,664,640	693,745,866,823
Belanja Modal (BM)	119,060,938,531	88,940,870,483	108,183,931,664	157,488,434,836	195,122,366,487
Belanja Daerah (BD)	527,680,265,062	555,073,238,921	633,158,289,351	761,671,439,876	926,688,086,441

1. Perhitungan Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

a. Rasio Derajat Desentralisasi

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2011} &= \frac{\text{PAD}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{17,509,803,128}{578,312,835,154} \times 100\% = 3.03\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{\text{PAD}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{21,834,740,641}{575,936,851,549} \times 100\% = 3.80\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{\text{PAD}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{24,044,536,482}{662,485,048,302} \times 100\% = 3.63\%\end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{PAD}}{\text{PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{46,404,259,984}{782,995,287,787} \times 100\% = 5.92\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{PAD}}{\text{PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{75,599,713,319}{985,110,700,579} \times 100\% = 7.67\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{PT}}{\text{PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{423,508,225,912}{578,312,835,154} \times 100\% = 73.23\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{PT}}{\text{PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{481,981,442,901}{575,936,851,549} \times 100\% = 83.68\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{PT}}{\text{PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{548,356,687,603}{662,485,048,302} \times 100\% = 82.77\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{PT}}{\text{PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{595,871,036,697}{782,995,287,787} \times 100\% = 76.11\% \text{ 1,147,873,340}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{PT}}{\text{PD}} \times 100\%$$

$$= \frac{721,962,706,908}{985,110,700,579} \times 100\% = 73.28\%$$

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{RPD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,035,576,248}{2,984,370,00} \times 100\% = 101.71\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{RPD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,621,248,360}{3,940,000,000} \times 100\% = 91.90\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{RPD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{4,577,272,246}{3,846,200,000} \times 100\% = 119.07\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{RPD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{9,318,073,340}{8,170,200,000} \times 100\% = 114.04\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{RPD}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{10,812,469,620}{8,706,250,000} \times 100\% = 124.19\%$$

Sedang perhitungan rasio Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{BPPD}}{\text{RPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{51,206,248}{3,035,576,248} \times 100\% = 1.68\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{BPPD}}{\text{RPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{318,751,640}{3,621,248,360} \times 100\% = 8.80\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{BPPD}}{\text{RPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{318,751,640}{3,621,248,360} \times 100\% = 15.97\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{BPPD}}{\text{RPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{1,147,873,340}{9,318,073,340} \times 100\% = 12.31\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{BPPD}}{\text{RPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{2,106,219,620}{10,812,469,620} \times 100\% = 19.47\%$$

d. Rasio Derajat Kontribusi BUMD

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2011} &= \frac{\text{BL}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{2,319,144,577}{578,312,835,154} \times 100\% = 0.40\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{\text{BL}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{2,327,025,979}{575,936,851,549} \times 100\% = 0.40\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{\text{BL}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{2,587,719,012}{2,587,719,012} \times 100\% = 0.38\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{\text{BL}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{3,108,716,331}{782,995,287,787} \times 100\% = 0.39\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2015} &= \frac{\text{BL}}{\text{PD}} \times 100\% \\ &= \frac{4,442,531,837}{985,110,700,579} \times 100\% = 0.45\%\end{aligned}$$

2. Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Daerah

a. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2011} &= \frac{\text{BO}}{\text{BD}} \times 100\% \\ &= \frac{390,153,084,675}{527,680,265,062} \times 100\% = 73.93\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{\text{BO}}{\text{BD}} \times 100\% \\ &= \frac{445,403,934,828}{555,073,238,921} \times 100\% = 80.24\%\end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{BO}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{505,170,370,686}{633,158,289,351} \times 100\% = 79.78\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{BO}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{585,410,664,640}{761,671,439,876} \times 100\% = 76.85\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{BO}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{693,745,866,823}{926,688,086,441} \times 100\% = 74.86\%$$

b. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{BM}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{119,060,938,531}{527,680,265,062} \times 100\% = 22.56\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{BM}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{88,940,870,483}{555,073,238,921} \times 100\% = 16.02\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{BM}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{108,183,931,664}{633,158,289,351} \times 100\% = 17.08\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{BM}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{157,488,434,836}{761,671,439,876} \times 100\% = 20.67\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{BM}}{\text{BD}} \times 100\%$$

$$= \frac{195,122,366,487}{926,688,086,441} \times 100\% = 21.05\%$$

LAMPIRAN 2
PERHITUNGAN RASIO

LAMPIRAN 1
RINGKASAN LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI

LAMPIRAN 3

RIWAYAT HIDUP



Wahyuniar. Panggilan Niar lahir di Sinjai pada tanggal 25 April 1995. Buah hati dari ayahanda Hasaning dan ibunda Halifa. Saya merupakan anak terakhir dari lima bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Makassar di BTN. Minasa Upa blok F.10.no 24. Pendidikan yang telah di tempu oleh peneliti yaitu sekolah di SD 68 Manipi dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sinjai Barat dan lulus pada tahun 2010, dan kembali melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Sinjai Barat dan menyelesaikan studi pada tahun 2013. Pada tahun tersebut pula penulis melanjutkan sudi ke perguruan tinggi swasta di Makassar. Penulis pun terdaftar sebagai mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Berkat karunia Allah SWT, selama menjalani segala aktivitas akademik di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar penulis menyelesaikan studi pada tahun 2017 dengan judul skripsi “ **Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sinjai**”.